



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Bangka Pos

Babel News

Rakyat Pos

Babel Pos

Radar Bangka

Lainnya: _____

Tanggal:

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1	2	3	4	5	6	2
7	8	9	10	11	12	0
						1
						9

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Gubernur Tak Punya Hak Tanpa Persetujuan DPRD

■ Rencana Tambahan Modal Rp 30 Miliar ke BUMD

PANGKALPINANG, BANGKAPOS - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun ini berencana akan menambah penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) sebesar Rp 30 miliar. Rencana ini mendapat tanggapan dari DPRD Babel. Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya mendesak pemerintah provinsi melakukan kajian secara komprehensif dulu mengenai penyuntikan dana kepada BUMD.

"Jangan sampai nanti menyuntik-nyuntik ujungnya kita tidak mendapatkan keuntungan tambahan pendapatan dari BUMD,"

tegas Didit, Senin (8/4).

Dirinya pun meminta agar pihak BUMD melakukan paparan kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung, dan dirinya menegaskan jika hal tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPRD, dan gubernur tidak memiliki hak menjalankan hal tersebut tanpa persetujuan dari DPRD.

"Gubernur tidak berhak menjalankan itu tanpa ada persetujuan dari DPRD, dan itu juga harus dianggarkan, harus diperdakan, ingat itu mekanismenya panjang. Hati-hati dalam menggunakan uang negara," tegas Didit.

Ia pun mengatakan bahwa DPRD tidak melarang pemprov untuk mengembangkan BUMD. Namun akan lebih baik jika BUMD menggunakan pihak ke tiga atau investor, dibandingkan menggunakan uang daerah. Gubernur Babel, Erzla-



* BANGKA POS/MUHAMMAD KENI
Didit Srigusjaya

di menyebutkan, tambahan penyertaan modal ini agar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan membuka peluang usaha baru.

"Sekarang BUMD sudah mulai mau bergerak, kita akan menambah modal. Tambahan modal ini sekitar

Rp 30 miliar ini bukan untuk bayar gaji, tapi untuk bangun usaha misalnya pabrik garam, pabrik CPO kerjasama dengan koperasi termasuk pengolahan mineral ikutan," kata Erzaldi belum lama ini.

Erzaldi menilai, banyak peluang bisnis yang bisa dijalankan BUMD, misalnya pabrik garam dengan memanfaatkan potensi kelautan Babel, yang nantinya akan bekerjasama dengan perusahaan yang sudah ahli.

Untuk mengatasi persoalan harga sawit, BUMD juga akan mengembangkan bisnis pabrik CPO. Nantinya, dari pabrik ini juga harus ada produk hilirasasinya misalnya minyak goreng.

Kedepan, menurutnya BUMD harus memberikan kontribusi pendapatan daerah yang lebih besar dengan berbagai bisnis yang dijalankan. (o2/r1)

Gunakan APBD 2019

KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan, dan penelitian pengembangan daerah (Bappppeda) Babel, Ferry Insani menjelaskan, wacana penyertaan modal ini sudah dianggarkan dalam APBD Babel tahun 2019, namun ini belum bisa digunakan lantaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Babel terlebih dahulu melalui peraturan daerah.

"Ini sudah dianggarkan dalam APBD tahun 2019, besarnya kalau enggak salah Rp 30 Miliar, tapi ini belum bisa langsung digunakan, kita harus mengajukan Perda penyertaan modal dulu ke DPRD, kalau disetujui baru bisa digukan," kata Ferry, Senin (8/4).

Dijelaskannya ada mekanisme yang harus ditempuh, sebelum mengajukan perda, harus memiliki penasihat investasi untuk mengawasi, memberikan masukan dan analisis rencana penyertaan modal.

"Penasihat investasi harus dari independen, bisa dari akademisi, ahli dan lainnya. Nanti mereka yang akan melakukan kajian, sebelum perdanya kita serahkan. Dalam waktu dekat ini kita akan tentukan penasehatnya setelah itu baru ajukan perda, keputusan akhirnya ada di DPRD karena mereka yang menentukan," tambahnya.

Ia menyebutkan, wacana ini sebetulnya sudah lama agar BUMD dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi, yang diharapkan nantinya membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

"Ada banyak peluang dan potensi jenis usaha yang dijalankan, misalnya menjadi buffer stock untuk komoditi tertentu. Yang paling penting nanti harus memberikan lapangan pekerjaan," katanya. (o2)

Informasi PLH CALL CENTER : 123

Keputusan akan dilaksanakan pekerjaan Pem-
tan lokal PLH, dengan jadwal sebagai berikut:

FAKOR/JALAN	RETRANSAK
No. Rute	
Alamat	
Info Contact: 31 seramang	
30 Manur, Bangka Tin. PT. AYO	
Manur, Dst. Manur Tin	
Manur	

TTD
MANAJER